



RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI SULAWESI UTARA

TAHUN 2022



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN.....	2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA BKD PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN LALU.....	10
BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH....	55
BAB V PENUTUP.....	56



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara merupakan dokumen perencanaan sebagai pedoman kerja Badan Kepegawaian Daerah selama satu tahun kedepan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Selain itu, dokumen ini juga berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah yang sifatnya lebih fokus dan mendalam.

Sebagai sebuah dokumen resmi, Rencana Strategis (Renstra) memiliki kedudukan penting dalam sinkronisasi antara rencana kerja tahunan BKD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sehingga menjadi satu kesatuan dalam mendukung tercapainya Visi dan Misi Daerah.

Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara disusun oleh tim penyusun Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara, dilakukan secara terpadu, partisipatif dan demokratis. Dokumen ini digunakan sebagai bahan dasar penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) BKD Provinsi Sulawesi Utara, yang selanjutnya menjadi bagian dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara dan Penjabaran APBD.

Dokumen ini pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis dalam menanggapi isu-isu yang berkembang yang diimplementasikan kedalam program dan kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Utara. Kualitas dokumen Renja sangat ditentukan oleh kualitas program dan kegiatan yang akan dilaksanakan. Dengan demikian penyusunan Renja sangat ditentukan oleh kemampuan BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam menyusun, mengorganisasikan, melaksanakan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program dan kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi BKD sebagai salah satu instansi pemerintah.



Berdasarkan ketentuan dalam Bagian Ketujuh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, ada 6 (enam) poin tata cara penyusunan Renja Perangkat Daerah, yaitu dimulai dari Persiapan Penyusunan Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Awal Renja Perangkat Daerah, Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah, Perumusan Rancangan Akhir Renja Perangkat Daerah, sampai pada Penetapan Renja Perangkat Daerah.

Penyusunan rancangan awal Rencana Kerja merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja Perangkat Daerah. Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dikerjakan secara simultan/parallel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renja Perangkat Daerah.

Tahap penetapan rancangan akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala Perangkat Daerah menetapkan Renja Perangkat Daerah untuk menjadi pedoman di lingkungan Perangkat Daerah dalam menyusun program dan kegiatan prioritas Perangkat Daerah beserta kerangka anggaran pada tahun anggaran pelaksanaan Renja tersebut.

Dengan demikian, maka Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 akan dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 yang telah ditetapkan sebagai salah satu Prioritas Pembangunan Daerah dari segi peningkatan



kualitas sumber daya aparatur yang mandiri, berintegritas, profesional serta berdaya saing yang secara implementatif akan mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan pemerintah daerah. Setelah Prioritas Pembangunan Daerah dari kegiatan-kegiatan dalam Renja disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Utara, selanjutnya dituangkan untuk menjadi satu dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

1.2 LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 adalah :

1. Landasan Idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : UUD RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - c. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - d. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - e. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
 - f. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
 - i. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;



- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah;
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- m. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1 tahun 2008 tentang Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara;
- n. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Penyusunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
- o. Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 82 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tipe A Provinsi Sulawesi Utara.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penetapan Renja BKD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 dimaksudkan untuk mewujudkan komitmen dalam rangka peningkatan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah untuk tahun pelaksanaan Renja. Sedangkan tujuan dari penyusunan Renja adalah:

- 1. Mewujudkan kebutuhan atas target perencanaan strategis sebagai acuan dalam penyusunan rencana kegiatan sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan



Pembangunan Nasional yang mewajibkan setiap instansi pemerintah untuk menyusun perencanaan strategis.

2. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Provinsi Sulawesi Utara.
3. Sebagai acuan dalam penyusunan RKA BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

1.4 SISTEMATIKA

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah, keterkaitan antara Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD, Renstra Perangkat Daerah serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah serta pedoman yang dijadikan landasan yuridis formil dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian



tahun berjalan (tahun $n-1$), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

- 1) Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 2) Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 3) Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
- 4) Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
- 5) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
- 6) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PERANGKAT DAERAH

Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, yang diharmonisasikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.



2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah

Subbab ini berisi uraian tentang:

- a. Tingkat kinerja pelayanan Perangkat Daerah dan terkait isu strategis dalam pelayanan Perangkat Daerah;
- b. Kendala yang ditemui dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah;
- c. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah dan terhadap capaian program nasional/global;
- d. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Perangkat Daerah;
- e. Rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program prioritas tahun rencana.

2.4. Review terhadap Rancangan Akhir RKPD

Subbab ini berisikan uraian tentang:

- a. Proses yang dilakukan untuk membandingkan antara rancangan akhir RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
- b. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;
- c. Penjelasan evaluasi setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan akhir RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Subbab ini berisi uraian tentang program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan dan atau *stakeholder*.

BAB III TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 Telaah terhadap kebijakan nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang disinergikan dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.



3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini menjelaskan tentang perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu aktual penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan disinkronisasikan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

3.3 Program dan Kegiatan Tahun 2022

Berisikan penjelasan tentang:

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi:
 - Jumlah program dan jumlah kegiatan
 - Sifat program dan kegiatan

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

Bab ini menguraikan tentang Rencana kerja dan pendanaan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022.

BAB V PENUTUP

Bab ini menguraikan tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun upaya yang ditempuh apabila ketersediaan anggaran yang tidak mencukupi, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.



BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

BKD POVINSI SULAWESI UTARA TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Evaluasi yang dimaksud berupa capaian atas program dan kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun sebelumnya yang dapat diukur melalui beberapa parameter atau indikator kinerja dengan menggunakan pembandingan antara kinerja nyata dan kinerja yang direncanakan, serta kinerja nyata dan kinerja tahun sebelumnya. Hal tersebut dapat diketahui melalui Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020. Dari hasil laporan tersebut dapat menjelaskan bahwa indikator kinerja serta sasaran program dan kegiatan secara umum berhasil dengan uraian sebagai berikut:

a. Program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program ini adalah program rutin yang dilaksanakan oleh BKD Provinsi Sulawesi Utara dalam rangka optimalisasi fungsi pelayanan administrasi perkantoran. Kegiatan yang dilaksanakan antara lain, penyediaan kebutuhan administrasi umum, penyediaan kebutuhan administrasi keuangan, penyediaan kebutuhan administrasi barang/jasa, penyediaan kebutuhan administrasi kepegawaian, hingga pelaksanaan rapat koordinasi dan konsultasi. Pada tahun 2020, program ini berjalan sesuai yang direncanakan yaitu mencapai 100%.



2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program ini bertujuan untuk menunjang pelaksanaan berbagai kegiatan harian maupun dalam rangka melaksanakan pelayanan publik. Adapun uraian program ini antara lain: pengadaan peralatan/perlengkapan gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor; pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional; dan pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan gedung kantor. Pada akhir tahun 2020 program ini mencapai target 100% sesuai yang direncanakan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program ini bertujuan meningkatkan disiplin PNS di Lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Utara dengan menaati ketentuan penggunaan pakaian dinas harian sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Adapun output dari kegiatan ini adalah tersedianya mesin/kartu absensi, pakaian dinas beserta perlengkapannya dan pakaian khusus pada hari-hari tertentu. Pada tahun 2020, program ini berjalan baik sesuai dengan perencanaan, yaitu dengan tercapainya target 100%.

4. Program Perencanaan Perangkat Daerah

Program ini merupakan suatu Perencanaan yang menjadi penentuan pilihan berdasarkan pertimbangan fakta yang ada untuk mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Hasil dari perencanaan ini yang menjadi panduan dan patokan dalam pelaksanaan kegiatan. Program ini lebih diarahkan untuk menyusun Rencana Kerja dan Rencana Kerja Anggaran BKD Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, program ini merupakan bentuk pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004. Pada Tahun 2020, realisasi program ini mencapai 100%.

5. Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian

Program ini bertujuan untuk mengembangkan sistem manajemen kepegawaian di Provinsi Sulawesi Utara yang selaras dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Dan ada kegiatan yang ditambahkan dan tidak lagi dilaksanakan. Kegiatan yang dilaksanakan yaitu: konsolidasi Manajemen kepegawaian Se-Sulawesi Utara, Diseminasi hasil



pembangunan daerah bidang kepegawaian, survey pelayanan kepegawaian dan forum BKD. Realisasi program ini mencapai 100%.

6. Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian

Program ini merupakan penjabaran salah satu fungsi pelayanan publik pada BKD Provinsi Sulawesi Utara melalui pemberian kenaikan pangkat, pemindahan dan pensiun PNS. Program ini memuat antara lain pengelolaan kenaikan pangkat, pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat penyesuaian ijazah, pembekalan bagi pegawai ASN memasuki purna tugas, pemrosesan pensiun, penilaian kompetensi PNS pindah-masuk pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, pengelolaan cuti, pemindahan dan penempatan pegawai ASN. Realisasi program ini mencapai 100 %.

7. Program Pengembangan Data dan Sistem Informasi Kepegawaian

Tujuan pelaksanaan program ini adalah untuk membangun dan memelihara jaringan informasi kepegawaian yang dijabarkan melalui kegiatan pengembangan sistem informasi ASN terintegrasi dan pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah. Pelaksanaan program ini berjalan sesuai rencana sehingga mencapai target yaitu 100%.

8. Program Pembinaan Aparatur

Program pembinaan dan pengawasan aparatur merupakan salah satu fungsi BKD sebagai garda terdepan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menegakkan disiplin dan meningkatkan kinerja ASN. Berbagai upaya tersebut terimplementasikan melalui tindakan preventif. Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah Inspeksi disiplin dan kehadiran pegawai ASN, penilaian kinerja dan disiplin pegawai ASN dan Pemrosesan kasus pelanggaran disiplin. Program ini berjalan dengan lancar bahkan melebihi target, yaitu 109%.

9. Program Perencanaan dan Pengadaan Aparatur

Program ini bertujuan untuk melaksanakan perencanaan terhadap ketersediaannya Sumber Daya Aparatur yang berkualitas dan memiliki kompetensi yang memadai untuk mengisi kebutuhan formasi ASN sesuai hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sehingga memiliki tingkat



produktivitas yang tinggi dalam pelaksanaan tugas pelayanan publik. Adapun kegiatan yang dilaksanakan antara lain : kajian kebijakan dan hukum bidang kepegawaian, penyusunan formasi pegawai ASN, pengembangan manajemen ASN berbasis meritokrasi, penerimaan calon pegawai ASN, diseminasi Pendidikan/sekolah kedinasan, pelaksanaan penerimaan praja/taruna sekolah kedinasan utusan Sulawesi utara. Pada tahun 2020, program ini melebihi target, yakni mencapai 112,5%.

10. Program Pengembangan Kesejahteraan Pegawai

Kegiatan ini bertujuan untuk menjamin kesejahteraan dari PNS dilingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara serta memberikan kesempatan bagi PNS untuk mengikuti seleksi ASN berprestasi dengan mengacu dari beberapa kriteria yang telah ditetapkan, antara lain memiliki dedikasi, disiplin yang tinggi serta berkinerja baik. ASN yang mengikuti seleksi ini merupakan utusan dari Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota. Sedangkan pemberian penghargaan satya lancana karya satya merupakan salah satu bentuk penghargaan yang diberikan oleh pemerintah atas totalitas pengabdian PNS sebagai abdi Negara untuk kurun waktu 10 tahun, 20 tahun dan 30 tahun masa tugas.

Secara keseluruhan, Program ini memuat antara lain, Pemrosesan pemberian penghargaan Satyalancana Karya dan pelaksanaan sumpah/janji PNS. Pada Tahun 2020 realisasi program ini mencapai 105,83%.

11. Program Pengembangan Aparatur

Kegiatan ini ditujukan dalam rangka pengembangan Aparatur Sipil Negara. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pengembangan Pendidikan Formal ASN, Assesment Kompetensi Pegawai ASN, Seleksi JPT, Mutasi Jabatan Administrasi, Pelantikan dan serah terima jabatan, Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu, pelaksanaa Sertifikasi Kompetensi JFT, peningkatan kompetensi dan keterampilan teknis, fungsional dan



manajerial kepegawaian ASN. Adapun realisasi program ini mencapai 98,35%.

b. Program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan:

1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program ini merupakan program teknis yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur baik di lingkungan BKD Provinsi Sulawesi Utara pada khususnya maupun Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dan Kabupaten/Kota pada umumnya. Kegiatan yang dilaksanakan adalah Pelatihan Kantor Sendiri. Pada tahun 2020 realiasi program ini mencapai 83,33%.

2. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dilingkup BKD Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam suatu dokumen Laporan Pertanggungjawaban Capaian Kinerja sebagai aktualisasi realisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Adapun output dari kegiatan ini adalah penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah dan penyusunan laporan bulanan perangkat daerah. Pada tahun 2020, realisasi program ini mencapai 83,33%.

3. Program Pembinaan, Fasilitasi Profesi dan Penguatan Kelembagaan Korpri

Program ini adalah program Tahun 2020 yang memiliki tujuan untuk memberikan berbagai fasilitasi dan bantuan bagi seluruh ASN yang adalah anggota Koprs Pegawai Republik Indonesia. Adapun berbagai kegiatan dalam program ini, antara lain: Penyediaan kebutuhan administrasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI, Pelayanan Konsultasi Bantuan Hukum Anggota KORPRI. Realisasi program ini mencapai 87.5%.



2) Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Dalam Pelaksanaan Program dan Kegiatan dalam Renja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020 terdapat 11 program yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan dan 3 program yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan. Meskipun begitu, secara keseluruhan menghasilkan implikasi peningkatan baik secara lambat, sedang, maupun cepat terhadap target capaian Program Renstra Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara.

3) Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut

Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut, yaitu:

- 1) Mengidentifikasi dan mengurutkan kegiatan yang menjadi prioritas;
- 2) Perlunya perencanaan program/kegiatan secara matang dan terukur;
- 3) Perlunya komitmen setiap Pegawai yang terlibat dalam perencanaan program/kegiatan untuk melaksanakannya dengan baik



TABEL 2.1
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENCANA KERJA
DAN PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS s/d TAHUN 2020
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2020			Target program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah tahun 2021)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun 2021	
					Target Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2021	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran, serta pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 12 Bln	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 36 Bln	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 12 Bln	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 12 Bln				
	Keg Penyediaan Kebutuhan Administrasi Umum	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum	12 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%		48 Bln	133%
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Keuangan	Prosentase ketersediaan kebutuhan keuangan	12 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%		48 Bln	133%
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Barang/Jasa	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa	12 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%		48 Bln	133%
	Penyediaan Kebutuhan Administrasi Kepegawaian	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	12 Bln	36 Bln	12 Bln	12 Bln	100%		48 Bln	133%
	Pelaksanaan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	12 Keg	73 Keg	12 Keg	12 Keg	100%		85 Keg	116%
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pekerjaan PNS BKD	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 121 unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 121 unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 121 unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 121 unit				
	Pengadaan peralatan/ perlengkapan Gedung kantor	Prosentase ketersediaan perlengkapan kantor yang memadai	121 unit	121 unit	121 unit	121 unit	100%		242 unit	200%
	Pemeliharaan rutin/berkala Gedung kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Gedung kantor	1 Gedung	2 Gedung	1 Gedung	1 Gedung	100%		3 Gedung	150%
	Pemeliharaan rutin / berkala kendaraan dinas / operasional	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional	13 unit	13 unit	13 unit	13 unit	100%		26 unit	200%
	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan/perlengkapan Gedung kantor	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan Gedung kantor	308 unit	309 unit	308 unit	308 unit	100%		617 unit	200%
	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Tingkat ketaatan dan kepatuhan aparatur terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparatur terhadap pimpinan dan institusi	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata 2 unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata 10 Unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata 2 unit	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata 2 unit				
	Pengadaan mesin/kartu absensi	Jumlah mesin/kartu absensi	2 unit	10 Unit	2 unit	2 unit	100%		12 unit	120%



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

			Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	76 org	210 ASN	76 org	76 org	100%			286 org	136%
			Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas	76 PNS	220 ASN	76 PNS	76 org	100%			296 org	135%
			Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Tingkat pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi, serta peraturan di bidang pemerintahan daerah dan kepegawaian	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata 12 materi	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata 31 keg	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata 12 materi	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD rata-rata 10 materi					
			Pelatihan Kantor Sendiri	Jumlah pelaksanaan pelatihan Tupoksi BKD bagi PNS BKD	12 materi				83%			41 materi	132%
			Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat penyelesaian dan kualitas pelap kinerja dan keuangan	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 3 lap	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 9lap	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 3lap	Nilai Akuntabilitas Kinerja BKD 2lap					
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Jumlah lap	3 lap				67%			11 lap	122%
			Penyusunan laporan Bulanan SKPD	Jumlah lap	10 lap	30 lap	10 lap	10 lap	100%			40 lap	133%
			Program Perencanaan PD	Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD	4 dok	5 dok	4 dok	4 dok					
			Penyusunan Rencana Kerja PD	Dok Renja	2 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100%			6 Dok	150%
			Penyusunan Rencana Kerja Anggaran	Dok RKA	2 Dok	4 Dok	2 Dok	2 Dok	100%			6 Dok	150%
			Program Pembinaan Manajemen Kepegawaian	Peningkatan kinerja pelayanan publik BKD	15 Kabupaten dan Kota 2 lap	15 Kabupaten dan Kota 2 keg	15 Kabupaten dan Kota 2 lap	15 Kabupaten dan Kota 2 lap					
			Konsolidasi Manajemen Kepegawaian se-Provinsi Sult	Jumlah Pelaksanaan Manajemen Kepegawaian	2 lap				100%			4 lap	200%
			Diseminasi Hasil Pembangunan Daerah Bidang Kepegawaian	Keg Penyediaan Bahan Untuk Kebutuhan Diseminasi	2 materi	2 keg	2 materi	2 materi	100%			4 materi	200%
			Forum BKD	Jumlah pelaksanaan forum BKD	1 berita acara	6 keg	1 berita acara	1 berita acara	100%			7 berita acara	117%
			Survey Pelayanan Kepegawaian	Informasi indeks profesionalitas, indeks kepuasan masyarakat, indeks integritas	1 buku	1 buku	1 buku	1 Buku	100%			2 Buku	200%
			Program Pengembangan Aparatur Sipil Negara	Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang berkualitas, profesional, dan berkompeten	1. Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah Jab	1. Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah Jab	1. Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah Jab	1. Jumlah JPT (44 org) , 2. Jumlah Jab					
			Pengembangan Pendidikan Formal Aparatur Sipil Negara	Jumlah PNS Pemprov. Sult mengikuti tugas belajar	49 org	128 keg	49 org	49 org	100%			177 org	138%
			Assesment Kompetensi Pegawai ASN	Jumlah lap assesment	1 lap	4 lap	1 lap	1 lap	100%			5lap	125%
			Pengembangan Inovasi Aparatur Negara	Jumlah Pelaksanaan keg Lomba Inovasi Aparatur Negara	1 keg	1 keg	1 keg	1 keg				2 keg	200%
			Pengelolaan Pengangkatan dan Pemberhentian serta Kenaikan Jabatan Fungsional Tertentu	Jumlah JFT yang difasilitasi	350 berkas	594 berkas	350 berkas	298 berkas	85%			892 berkas	150%
			Seleksi jabatan pimpinan tinggi	Jumlah thpn seleksi jabatan pimpinan tinggi	5 thpn	12 thpn	5 thpn	5 thpn	100%			17 thpn	142%
			Mutasi jabatan administrasi	Jumlah thpn mutasi jabatan administrator dan labatan pnaawas	4 thpn	16 thpn	4 thpn	4 thpn	100%			20 thpn	125%



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

	Pelantikan dan serah terima jabatan	Jumlah perangkat daerah/instansi pemerintah	40 PD/instansi pemerintah	40 PD	40 PD/instansi pemerintah	40 PD/instansi pemerintah	100%		80 PD/instansi pemerintah	200%
	Pelaksanaan sertifikasi kompetensi jabatan fungsional tertentu	Jumlah keg sertifikasi kompetensi jabatan fungsional terbetitu	2 dok	9 dok	2 dok	2 dok	100%		11 dok	122%
	Peningkatan Kompetensi dan Keterampilan Teknis, Fungsional dan Manajerial kepegawaian ASN	Jumlah pegawai ASN yang ditugaskan dalam diklat, bintek, kursus, seminar, penataran, dan praktek kerja di kantor pemerintah dan swasta, dalam dan luar negeri	4 org	150 org	4 org	4 org	100%		154 org	103%
	Peningkatan Kompetensi kepemimpinan pegawai ASN	Jumlah pegawai Asn yang ditugaskan dalam diklat kepemimpinan	1 org	66 org	1 org	1 org	100%		67 org	102%
	Program Pengelolaan Mutasi dan Status Kepegawaian	Tingkat kinerja peningkatan karir, mutasi dan proses pensiun PNS	7 Pelayanan Administrasi 4000 Dok	8 Pelayanan Administrasi 13205 Dok	8 Pelayanan Administrasi 4000 Dok	8 Pelayanan Administrasi 2633 Dok				
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat	ketersediaan kebutuhan untuk penyelenggaraan Keg pengelolaan kenaikan pangkat PNS	4000 Dok				66%		15838 Dok	120%
	Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah	Jumlah pelaksanaan ujian dinas dan ujian kenaikan pangkat, pemindahan, dan pensiun	1 Keg	3 keg	1 Keg	1 Keg	100%		4 Keg	133%
	Pemrosesan Pensiun	Pengelolaan konsep SK Pensiun dan pengusulan pensiun untuk pemberian keputusan	1 Keg	3 keg	1 Keg	1 Keg	100%		4 Keg	133%
	Pemrosesan Status Pegawai ASN	Jumlah keg pemrosesan status ASN	1 Keg	2 keg	1 Keg	1 Keg	100%		3 Keg	150%
	Penilaian Kompetensi PNS Pindah - Masuk Pemprov Sulut	ketersediaan kebutuhan untuk penilaian kompetensi PNS pindah masuk Pemprov. Sulut	1 Keg	6 keg	1 Keg	1 Keg	100%		7 Keg	117%
	Pengelolaan Cuti, Pemindahan dan Penempatan PNS	Jumlah dok usulan Cuti dan Pindah yang dapat diproses	500 Dok	1935 keg	500 Dok	802 Dok	160%		2737 Dok	141%
	Program Pembinaan Aparatur	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	4% pada akhir tahun	4% pada akhir tahun	4% pada akhir tahun	4% pada akhir tahun				
	Penilaian kinerja dan Disiplin Pegawai ASN	Jumlah pelaksanaan verifikasi dan evaluasi kehadiran PNS dan kinerja PNS	456 rekomendasi	492 rekomendasi	456 rekomendasi	456 rekomendasi	100%		948 rekommen dasi	193%
	Pemrosesan Kasus Pelanggaran Disiplin	Jumlah penanganan kasus yang dilakukan PNS setiap tahun	5 kasus	58 kasus	5 kasus	10 kasus	200%		68 kasus	117%
	Inspeksi Disiplin dan Kehadiran PNS	Jumlah pelaksanaan Sidak	20 keg	93 keg	20 keg	27 keg	135%		120 keg	129%
	Pembinaan dan Pengembangan Karakter dan Mental ASN	Jumlah Pembinaan Pengembangan Karakter dan Mental ASN	1 keg	12 keg	1 keg	1 keg	100%		13 keg	108%
	Program Pembinaan, Fasilitas Profesi dan Penguatan Kelembagaan KORPRI	Tingkat pengkajian, pembinaan dan pengawasan aparatur	100%	100%	100%	100%				
	Pelayanan konsultasi bantuan hukum anggota KORPRI	Jumlah anggota KORPRI yang mendapat bantuan hukum, jumlah lap hasil bantuan hukum anggota KORPRI	12 lap	24 keg	12 lap	12 lap	100%		36 lap	150%
	Penyediaan kebutuhan administrasi sekretariat dewan pengurus KORPRI	Jumlah lap pelaksanaan tugas sekretariat DP KORPRI	12 lap	13 lap	12 lap	9 lap	75%		22 lap	169%



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

[illegible]



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

5	03	01	1.02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Trivulan/Semes teran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun												12 laporan	12 laporan	
5	03	01	1.03		Administrtasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah												Minimum B nilai	Minimum B nilai	
5	03	01	1.03	06	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun												12 laporan	12 laporan	
5	03	01	1.05		Administrtasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah												Minimum B nilai	Minimum B nilai	
5	03	01	1.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas												2 kegiatan	2 kegiatan	
5	03	01	1.05	03	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan yang disusun												1 laporan	1 laporan	
5	03	01	1.05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kegiatan yang dilaksanakan												4 kegiatan	4 kegiatan	
5	03	01	1.05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan												3 kegiatan	3 kegiatan	
5	3	1	1.06		Administrtasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah												Minimum B nilai	Minimum B nilai	
5	03	01	1.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor												12 kegiatan	12 kegiatan	
5	03	01	1.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan												1 kegiatan	1 kegiatan	
5	03	01	1.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi												12 kegiatan	12 kegiatan	
5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan												10 kegiatan	10 kegiatan	
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah												Minimum B nilai	Minimum B nilai	
5	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan												1 unit	1 unit	
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung/kantor												10 unit	10 unit	
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah												Minimum B nilai	Minimum B nilai	
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan												14 unit	14 unit	
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor												1 kegiatan	1 kegiatan	
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor												12 kegiatan	12 kegiatan	



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

[illegible]



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

[illegible]



2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Tugas dari Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Utara Nomor 82 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas dan Fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Tipe A Provinsi Sulawesi Utara yaitu membantu Gubernur dalam melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Kepegawaian Daerah.

Dalam melaksanakan tugas pokok, Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis;
2. Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
3. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
4. Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan, pengembangan aparatur, mutasi dan status kepegawaian, pembinaan dan kesejahteraan aparatur, serta perencanaan dan pendayagunaan aparatur; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

Untuk melaksanakan tugas pokok, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulut mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

- 1) Perumusan kebijakan teknis;
- 2) Penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- 3) Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kepegawaian daerah;
- 4) Penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan;
- 5) Penyelenggaraan urusan bidang pengembangan aparatur
- 6) Penyelenggaraan urusan bidang mutasi dan status kepegawaian



- 7) Penyelenggaraan urusan bidang perencanaan dan pendayagunaan aparatur;
- 8) Penyelenggaraan urusan bidang pembinaan dan kesejahteraan aparatur;
- 9) Penyelenggaraan urusan kelompok jabatan fungsional;
- 10) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi tersebut, sasaran yang hendak dicapai oleh BKD Provinsi Sulawesi Utara yaitu :

1. Terwujudnya aparatur negara yang memiliki kompetensi teknis dan kepemimpinan;
2. Terwujudnya sistem pelayanan administrasi kepegawaian yang cepat, tepat, akurat dan memuaskan;
3. Terwujudnya pola karier PNS;
4. Terwujudnya sistem informasi kepegawaian;
5. Terwujudnya pembinaan dan pengawasan;
6. Terwujudnya kesejahteraan aparatur negara.



TABEL 2.2
PENCAPAIAN KINERJA BELAYANAN
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

N0.	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	SPM/ Standar Nasion	IKK	Target Renstra SKPD				Realisasi			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2022	Tahun 2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	
1	Tingkat kinerja pelayanan administrasi perkantoran, serta pelaksanaan koordinasi dan konsultasi												
	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi umum	-	-	12				12		12	12		
	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi keuangan	-	-	12				12		12	12		
	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi pengadaan barang/jasa	-	-	12				12		12	12		
	Prosentase ketersediaan kebutuhan penyelenggaraan administrasi kepegawaian	-	-	12				12		12	12		
	Jumlah pelaksanaan koordinasi dan konsultasi	-	-	12				12		12	12		
2	Tingkat ketersediaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang dan pendukung pekerjaan PNS BKD												



	Prosentase ketersediaan perlengkapan kantor yang memadai									121									
	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan Gedung kantor									1									
	Prosentase pemeliharaan kendaraan dinas/operasional									13									
	Prosentase pelaksanaan pemeliharaan peralatan Gedung kantor									308									
3	Tingkat ketaatan dan kepatuhan aparaturnya terhadap peraturan yang berlaku, dedikasi dan loyalitas aparaturnya terhadap pimpinan dan institusi																		
	Jumlah mesin/kartu absensi									2									
	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas									76									
	Jumlah PNS yang menerima pakaian dinas									76									
4	Tingkat pengetahuan dan keahlian sumber daya aparatur dalam implementasi Tugas Pokok dan Fungsi, serta peraturan di bidang pemerintahan daerah dan kepegawaian																		
	Jumlah pelaksanaan pelatihan Tupoksi BKD bagi PNS BKD									12									10



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

[illegible]



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

[illegible]



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

[illegible]



	Jumlah aplikasi sistem informasi ASN terpadu/terintegrasi									1									
	pembangunan dan pemeliharaan SIMPEG yang terintegrasi									1									
14	Tingkat pelaksanaan penyediaan aparatur yang berkualitas, profesional, dan berkompeten																		
	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan									8									14
	Jumlah dokumen formasi yang tersusun									1									1
	jumlah kegiatan pengembangan manajemen ASN berbasis meritokrasi									1									1
	Jumlah thpn penerimaan calon pegawai ASN yang menjadi kewenangan daerah									4									4
	Jumlah kabupaten/kota yang mendapatkan diseminasi pendidikan/sekolah kedinasan									15									15
	Jumlah thpn penerimaan calon Praja/Taruna sekolah kedinasan yang menjadi kewenangan daerah									6									6
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah																		
	Jumlah dokumen yang disusun									1									1
	jumlah dokumen yang disusun									2									2
	jumlah laporan yang disusun									1									1



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

[illegible]



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

[illegible]



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian									100	100	100	100							
	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian yang diperbaharui secara berkala									90	90	90	90							
	Persentase Evaluasi terhadap Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian									100	100	100	100							
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN																			
	Persentase Pengelolaan Mutasi ASN berdasarkan standart Computer Assesment Test									100	100	100	100							
	Persentase Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN									100	100	100	100							
	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah; Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.									1082 53 6071	1082 53 6071	1082 53 6071	1082 53 6071							
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN																			
	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja									15	15	15	15							



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

	Persentase PNS yang mengikuti Assessment							100	100	100	100	
	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan							27	27	27	27	
	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat							20	20	20	20	
	Persentase Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN yang diusulkan							100	100	100	100	
	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah							300	300	300	300	
	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN											
	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan							2	2	2	2	
	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun							90	90	90	90	
	Persentase Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yang diusulkan							100	100	100	100	
	Persentase PNS yang terjamin SIDAK							1	1	1	1	
	Persentase Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN							100	100	100	100	



2.3 ISU – ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi intensitas daerah/masyarakat dimasa yang akan datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, dapat menghilangkan peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Provinsi Sulawesi Utara adalah melaksanakan manajemen kepegawaian di daerah. Seiring dengan perkembangan masyarakat dan dunia global maka manajemen kepegawaian terus mengalami perubahan. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan kepegawaian maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang.

Adapun isu strategis Nasional yang sangat berhubungan erat dengan Badan kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara, yaitu implementasi restrukturisasi jabatan fungsional yang sementara disusun dan dirancang untuk diterapkan pada Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Restrukturisasi jabatan ini merupakan salah satu cara dalam melakukan transformasi organisasi pemerintah yang merupakan proses mempersiapkan dan menata ulang segala sumber daya organisasi dan mengarahkannya untuk mencapai tingkat kinerja daya saing yang tinggi dalam lingkungan yang dinamis dan kompetitif untuk meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan manajemen kepegawaian di Provinsi Sulawesi Utara dalam jangka menengah, maka dapat dihasilkan rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan tahun 2022 antara lain :

1. Perlunya optimalisasi kompetensi dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi;



2. Perlu dilaksanakan pelayanan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan Minimum (SPM) untuk mendukung tercapainya reformasi birokrasi;
3. Penempatan pegawai yang disesuaikan dengan formasi, kompetensi dan kualifikasi pendidikan;
4. Perlunya menyusun sistem pola karier yang jelas dan terukur;
5. Penerapan sistem reward and punishment serta pembinaan di bidang kepegawaian;
6. Mensinergikan peraturan di tingkat kebijakan (pusat) antar kementerian/ lembaga;
7. Peningkatan kompetensi PNS pada bidang IT;
8. Perlunya mengintegrasikan SIMPEG Provinsi dan Kab/Kota.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AKHIR RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara disusun dengan berpedoman pada RPJPD Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan penjabaran dari RPJMD 2021-2026 Provinsi Sulawesi Utara, serta diserasikan dengan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. RKPD 2022 adalah RKPD pertama pada periode RPJMD 2021-2026 sebagai bagian dari gerobong pencapaian Visi: "SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK", serta terus berusaha dalam pencapaian Visi Pembangunan Jangka Panjang Daerah yaitu "SULAWESI UTARA YANG BERBUDAYA, BERDAYA SAING, AMAN, DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE KAWASAN ASIA TIMUR DAN PASIFIK"

Jika disandingkan dengan salah satu dari 5 misi pembangunan Sulawesi Utara yaitu mewujudkan "Pemerintahan Yang Baik dan Bersih , didukung oleh Sinergitas Antar Daerah" dan selaras dengan salah satu tujuan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara yaitu untuk meningkatkan manajemen pemerintahan sulawesi utara dalam tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya untuk mewujudkan sulawesi utara yang tertib administrasi dan



wilayah bebas korupsi serta mewujudkan ASN yang berwibawa dan profesional sesuai prinsip *good governance*, oleh karena itu pelaksanaan program dan kegiatan pada BKD Provinsi Sulawesi Utara harus sejalan dengan rencana dan tujuan yang tercantum dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara. Berikut ini program dan kegiatan BKD Provinsi Sulawesi Utara yang berkaitan dengan RKPD Provinsi Sulawesi Utara.



TABEL 2.3
REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2022
PROVINSI SULAWESI UTARA

Rancangan Awal RKPD					Hasil Kebutuhan Analisis					Catatan Penting	
No	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Pagu Indikatif	Usuran/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN											
KEPEGAWAIAN											
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI											
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	102,580,942	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	105,658,370	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	42,085,226	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Jumlah dokumen yang disusun	1 dokumen	43,347,783	
	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Sulut	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	48,810,966	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Prov. Sulut	Jumlah dokumen yang disusun	2 dokumen	50,275,295	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Prov. Sulut	Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	11,684,750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja	Prov. Sulut	Jumlah laporan yang disusun	1 laporan	12,035,293	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	10,365,025,063	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	10,675,975,815	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sulut	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	90 orang	10,231,962,333	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Prov. Sulut	Jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	90 orang	10,538,921,203	
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Sulut	Jumlah dokumen keuangan yang diproses	37 dokumen	122,502,980	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Prov. Sulut	Jumlah dokumen keuangan yang diproses	37 dokumen	126,178,069	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Sulut	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	10,559,750	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Prov. Sulut	Jumlah laporan keuangan yang disusun	12 laporan	10,876,543	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	10,428,498	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	10,741,353	
	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Sulut	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	12 laporan	10,428,498	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Prov. Sulut	Jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	12 laporan	10,741,353	



RENCANA KERJA
Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	603,302,650	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	621,401,730
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Sulut	jumlah pengadaan pakaian dinas	2 kegiatan	164,340,000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Prov. Sulut	jumlah pengadaan pakaian dinas	2 kegiatan	169,270,200
Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Sulut	jumlah laporan yang disusun	1 laporan	167,186,804	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Prov. Sulut	jumlah laporan yang disusun	1 laporan	172,202,408
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Sulut	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 kegiatan	118,885,407	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Prov. Sulut	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	4 kegiatan	122,451,969
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	536,171,517	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	552,256,663
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Sulut	jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 kegiatan	118,854,894	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Prov. Sulut	jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	12 kegiatan	122,420,541
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Sulut	jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan	1 kegiatan	42,065,997	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Prov. Sulut	jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan	1 kegiatan	43,327,977
Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Sulut	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kegiatan	18,067,500	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Prov. Sulut	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	12 kegiatan	18,609,525
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Sulut	jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	10 kegiatan	357,183,126	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Prov. Sulut	jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	10 kegiatan	367,898,620
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	578,970,003	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	596,339,103
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Sulut	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	270,000,000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Sulut	Jumlah Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	1 unit	278,100,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Sulut	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 unit	308,970,003	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Sulut	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor	10 unit	318,239,103
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	371,246,206	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Prov. Sulut	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Minimum B nilai	382,383,592
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Sulut	jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	14 unit	287,258,188	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Prov. Sulut	jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	14 unit	295,875,934



Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	35,200,000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	1 kegiatan	36,256,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	12 kegiatan	48,788,018	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Prov. Sulut	Jumlah kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	12 kegiatan	50,251,659
PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH									
Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Prov. Sulut	Persentase Pelayanan Administrasi dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	100 %	3,243,985,648	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Prov. Sulut	Persentase Pelayanan Administrasi dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	100 %	3,341,305,217
Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Prov. Sulut	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan	1 kajian	306,930,168	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Prov. Sulut	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan	1 kajian	316,138,073
Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Prov. Sulut	Persentase Formasi Berdasarkan Kebutuhan PNS	80 %	136,585,202	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Prov. Sulut	Persentase Formasi Berdasarkan Kebutuhan PNS	80 %	140,682,758
Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Prov. Sulut	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK yang dilaksanakan	100 %	872,901,098	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK	Prov. Sulut	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK yang dilaksanakan	100 %	899,088,131
Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Prov. Sulut	Persentase Administrasi Pemberhentian ASN yang ditetapkan	100 %	136,752,795	Persentase Administrasi Pemberhentian ASN yang ditetapkan	Prov. Sulut	Persentase Administrasi Pemberhentian ASN yang ditetapkan	100 %	140,855,379
Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Prov. Sulut	Persentase Lembaga Profesi ASN lingkup Pemerintah Provinsi yang difasilitasi	100 %	582,821,804	Fasilitas Lembaga Profesi ASN	Prov. Sulut	Persentase Lembaga Profesi ASN lingkup Pemerintah Provinsi yang difasilitasi	100 %	600,306,458
Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Sulut	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	544,200,000	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Sulut	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	560,526,000
Pengelolaan Data Kepegawaian	Prov. Sulut	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian yang diperbaharui secara berkala	90 %	457,872,832	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian yang diperbaharui secara berkala	Prov. Sulut	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian yang diperbaharui secara berkala	90 %	471,609,017
Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Sulut	Persentase Evaluasi terhadap Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	205,921,749	Persentase Evaluasi terhadap Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Sulut	Persentase Evaluasi terhadap Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	100 %	212,099,401



	Mutasi dan Promosi ASN	Prov. Sulut	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	100 %	656,688,085	Mutasi dan Promosi ASN	Prov. Sulut	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	100 %	676,388,728	
	Pengelolaan Mutasi ASN	Prov. Sulut	Persentase Pengelolaan Mutasi ASN berdasarkan standart Computer Assesment Test	100 %	101,277,588	Pengelolaan Mutasi ASN	Prov. Sulut	Persentase Pengelolaan Mutasi ASN berdasarkan standart Computer Assesment Test	100 %	104,315,916	
	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Prov. Sulut	Persentase Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100 %	185,359,351	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Prov. Sulut	Persentase Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	100 %	190,920,132	
	Pengelolaan Promosi ASN	Prov. Sulut	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah; Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	1082 jabatan 53 jabatan 6071 orang	370,051,146	Pengelolaan Promosi ASN	Prov. Sulut	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah; Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	1082 jabatan 53 jabatan 6071 orang	381,152,680	
	Pengembangan Kompetensi ASN	Prov. Sulut	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	100 %	7,531,626,474	Pengembangan Kompetensi ASN	Prov. Sulut	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	100 %	7,757,575,268	
	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Prov. Sulut	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja	15 orang	2,660,701,216	Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Prov. Sulut	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja	15 orang	2,740,522,252	
	Pengelolaan Assessment Center	Prov. Sulut	Persentase PNS yang mengikuti Assessment	100 %	108,100,000	Pengelolaan Assessment Center	Prov. Sulut	Persentase PNS yang mengikuti Assessment	100 %	111,343,000	
	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Prov. Sulut	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	27 orang	4,367,016,900	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Prov. Sulut	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	27 orang	4,498,027,407	
	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Prov. Sulut	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	20 orang	233,292,000	Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Prov. Sulut	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	20 orang	240,290,760	
	Facilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Prov. Sulut	Persentase Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN yang diusulkan	100 %	34,526,099	Facilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Prov. Sulut	Persentase Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN yang diusulkan	100 %	35,561,882	
	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Prov. Sulut	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	300 orang	127,990,259	Facilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Prov. Sulut	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	300 orang	131,829,967	



Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Sulut	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	100 %	731,937,094	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Sulut	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	100 %	753,895,207
Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Sulut	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan	2 kebijakan	15,453,250	Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Sulut	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan	2 kebijakan	15,916,848
Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Sulut	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	90 %	15,453,250	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Prov. Sulut	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	90 %	15,916,848
Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Prov. Sulut	Persentase Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yang diusulkan	100 %	324,388,254	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Prov. Sulut	Persentase Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yang diusulkan	100 %	334,119,902
Pembinaan Disiplin ASN	Prov. Sulut	Persentase PNS yang terjaring SIDAK	1 %	341,523,054	Pembinaan Disiplin ASN	Prov. Sulut	Persentase PNS yang terjaring SIDAK	1 %	351,768,746
Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Prov. Sulut	Persentase Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN	100 %	35,119,286	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Prov. Sulut	Persentase Pengelolaan Pelanggaran Disiplin ASN	100 %	36,172,865



BAB III

TUJUAN, SASARAN DAN PROGRAM KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, antara lain adalah memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Untuk mencapai hal itu, diperlukan ASN yang profesional, berintegritas, serta berdedikasi dalam melaksanakan tugas pelayanan publik, pemerintahan dan pembangunan. Untuk dapat menjalankan tugas-tugas tersebut, maka seorang pegawai ASN haruslah memiliki profesi dan manajemen ASN yang berdasarkan pada system merit atau perbandingan antara kualifikasi, kompetensi, dan kinerja yang dibutuhkan serta selaras dengan tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks demikian, maka Badan Kepegawaian Daerah sebagai salah satu institusi pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan ASN sesuai dengan kompetensi yang dipersyaratkan melalui **Peningkatan Profesionalisme Aparatur Pemerintah Daerah** yang terdapat dalam urusan wajib. Untuk menunjang program tersebut, BKD Provinsi Sulawesi Utara memberikan kesempatan bagi semua PNS untuk mengembangkan diri dan kompetensi yang dimiliki melalui kegiatan-kegiatan kediklatan baik Diklat Teknis maupun Diklat Fungsional. Selain kesempatan untuk mengikuti pendidikan formal berupa pemberian ijin belajar maupun tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA TAHUN 2022

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang. Penjabaran dari



tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur.

Untuk itu, disusun visi dan misi BKD yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukungnya. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun harus dikaitkan dengan RPJMD 2021 – 2026. Visi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diselaraskan dengan Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah :

“TERWUJUDNYA SULAWESI UTARA MAJU DAN SEJAHTERA SEBAGAI PINTU GERBANG INDONESIA KE ASIA PASIFIK MELALUI PENYELENGGARAAN MANAJEMEN KEPEGAWAIAN YANG PROFESIONAL DAN BERINTEGRITAS”.

Dalam rangka mewujudkan visi tersebut diatas, diperlukan tindakan nyata yang dijabarkan dalam Misi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang diadopsi dari Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara adalah penjabaran Misi ke-5 (Lima) yaitu:

“PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH, DIDUKUNG OLEH SINERGITAS ANTAR DAERAH.”

Berkaitan dengan hal tersebut, misi ini berupaya untuk memastikan adanya peningkatan pembangunan politik dan pemerintahan yang memiliki integritas, akuntabilitas, efektifitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang bertanggungjawab. Selain itu juga, kualitas tata kelola pemerintahan diharapkan dapat memberikan kontribusi yang optimal untuk mendukung keberhasilan pembangunan dan peningkatan daya saing. Adapun, langkah strategis yang dilakukan BKD Provinsi Sulawesi Utara:

1. Mengoptimalkan Perencanaan dan Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara.
2. Mengembangkan dan mengoptimalkan sistem informasi manajemen kepegawaian.
3. Mengoptimalkan pengawasan dan penegakan disiplin serta meningkatkan kesejahteraan pegawai ASN.



4. Mengoptimalkan pelayanan administrasi kepegawaian secara efektif dan efisien.
5. Mewujudkan dan meningkatkan kompetensi dan skill ASN.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai melalui Rencana Kerja BKD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022, sebagai berikut:

Tujuan :

Mewujudkan tersedianya Aparatur Sipil Negara yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi yang dibutuhkan dalam mendukung terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang baik.

Sasaran :

1. Mewujudkan kualitas perencanaan pegawai khususnya penyusunan formasi yang rasional;
2. Mewujudkan penerimaan penerimaan praja/taruna sekolah kedinasan yang berkualitas;
3. Mewujudkan pengelolaan penempatan dan pemindahan ASN yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
4. Terlaksananya sistem pengelolaan penempatan dan pemindahan ASN yang sesuai kompetensi dan kebutuhan organisasi;
5. Mewujudkan pengolahan pemberhentian dan status ASN yang optimal;
6. Mewujudkan pengelolaan kenaikan pangkat otomatis secara *paperless*;
7. Mewujudkan pelayanan administrasi kepegawaian yang berkualitas melalui SIMPEG *online*;
8. Mewujudkan pengawasan secara optimal dan komprehensif *e-absensi online*;
9. Mewujudkan penilaian kinerja ASN yang optimal melalui *e-performance*;
10. Mewujudkan sistem pengawasan dan pengendalian kepegawaian melalui pembinaan dan penegakkan disiplin ASN;



11. Mewujudkan sistem pembinaan manajemen kepegawaian yang optimal;
12. Mewujudkan peningkatan profesionalisme sumberdaya ASN melalui pendidikan dan pelatihan yang berbasis keterampilan atau keahlian;
13. Mewujudkan peningkatan etos kerja dan karir ASN melalui pembinaan karier dalam jabatan struktural dan fungsional;
14. Mewujudkan kesejahteraan ASN berdasarkan kinerja, masa kerja dan kompetisi;
15. Terlaksananya koordinasi perencanaan program yang efektif;
16. Mewujudkan pelayanan administrasi perkantoran yang optimal;
17. Mewujudkan penyediaan layanan informasi yang berkualitas;
18. Terlaksananya pembangunan, pengadaan dan peningkatan sarana dan prasarana di BKD Provinsi Sulawesi Utara.

Selain itu penyusunan Rencana Kerja juga diharapkan mampu menjawab isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah Provinsi yang sampai saat ini belum dapat dilaksanakan.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan oleh satu dan beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu adapun dapat dijabarkan sebagai berikut:

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD



2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
 - Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD
3. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD
4. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
 - Sub Kegiatan Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian
 - Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
 - Sub Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
5. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Sub Kegiatan Fasilitas Kunjungan Tamu
 - Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
6. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah
 - Sub Kegiatan Penunjang Urusan Pemerintah Daerah"
 - Sub Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - Sub Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya



7. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

8. Kegiatan Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN

- Sub Kegiatan Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN
- Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK
- Sub Kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian
- Sub Kegiatan Fasilitasi Lembaga Profesi ASN
- Sub Kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian
- Sub Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian
- Sub Kegiatan Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian

9. Mutasi dan Promosi ASN

- Sub Kegiatan Pengelolaan Mutasi ASN
- Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN
- Sub Kegiatan Pengelolaan Promosi ASN

10. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

- Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN
- Sub Kegiatan Pengelolaan Assessment Center
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN
- Sub Kegiatan Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat



- Sub Kegiatan Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN
- Sub Kegiatan Fasilitas Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional

11. Kegiatan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur

- Sub Kegiatan Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur
- Sub Kegiatan Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai
- Sub Kegiatan Pembinaan Disiplin ASN
- Sub Kegiatan Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN



TABEL 3.1
RUMUSAN RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2023
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI SULAWESI UTARA

Kode	Urusan/Bidang/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Rencana Tahun 2022				Catatan Penting	Prakiraan Maju Tahun 2023	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Pagu
5 03 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI								
5 03 01 1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Prov. Sulut	Minimum B nilai	102,580,942	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Minimum B nilai	110,580,942
5 03 01 1.01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan yang disusun	Prov. Sulut	1 dokumen	42,085,226	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 dokumen	44,085,226
5 03 01 1.01 04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	jumlah dokumen DPA yang disusun	Prov. Sulut	2 dokumen	48,810,966	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 dokumen	49,810,966
5 03 01 1.01 06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	jumlah laporan capaian realisasi kinerja yang disusun	Prov. Sulut	1 laporan	11,684,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	16,684,750
5 03 01 1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Prov. Sulut	Minimum B nilai	10,365,025,063	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Minimum B nilai	10,466,225,063
5 03 01 1.02 01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	jumlah ASN yang diberikan gaji dan tunjangan	Prov. Sulut	90 orang	10,231,962,333	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 orang	10,331,962,333
5 03 01 1.02 03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	jumlah dokumen keuangan yang diproses	Prov. Sulut	37 dokumen	122,502,980	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		37 dokumen	123,502,980
5 03 01 1.02 07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	jumlah laporan keuangan yang disusun	Prov. Sulut	12 laporan	10,559,750	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	10,759,750



5	03	01	1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Prov. Sulut	Minimum B nilai	10,428,498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Minimum B nilai	15,428,498
5	03	01	1.03	06 Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	jumlah laporan barang milik daerah yang disusun	Prov. Sulut	12 laporan	10,428,498	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 laporan	15,428,498
5	03	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Prov. Sulut	Minimum B nilai	603,302,650	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Minimum B nilai	683,302,650
5	03	01	1.05	02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	jumlah pengadaan pakaian dinas	Prov. Sulut	2 kegiatan	164,340,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kegiatan	194,340,000
5	03	01	1.05	03 Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	jumlah laporan yang disusun	Prov. Sulut	1 laporan	167,186,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 laporan	177,186,804
5	03	01	1.05	09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Prov. Sulut	4 kegiatan	118,885,407	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		4 kegiatan	148,885,407
5	03	01	1.05	10 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	jumlah kegiatan yang dilaksanakan	Prov. Sulut	3 kegiatan	152,890,439	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		3 kegiatan	162,890,439
5	3	1	1.1	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Prov. Sulut	Minimum B nilai	536,171,517	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Minimum B nilai	564,171,517
5	03	01	1.06	02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	jumlah kegiatan penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Prov. Sulut	12 kegiatan	118,854,894	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kegiatan	128,854,894
5	03	01	1.06	05 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	jumlah kegiatan penyediaan barang cetakan	Prov. Sulut	1 kegiatan	42,065,997	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	47,065,997
5	03	01	1.06	08 Fasilitas Kunjungan Tamu	jumlah kunjungan tamu yang difasilitasi	Prov. Sulut	12 kegiatan	18,067,500	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kegiatan	21,067,500



5	03	01	1.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	jumlah kegiatan koordinasi/konsultasi yang dilaksanakan	Prov. Sulut	10 kegiatan	357,183,126	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	10 kegiatan	367,183,126
5	03	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Prov. Sulut	Minimum B nilai	578,970,003	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Minimum B nilai	638,970,003
5	03	01	1.07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Prov. Sulut		270,000,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum			300,000,000
5	03	01	1.07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah pengadaan sarana dan prasarana gedung/kantor	Prov. Sulut	10 unit	308,970,003	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		10 unit	338,970,003
5	03	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Prov. Sulut	Minimum B nilai	371,246,206	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	Minimum B nilai	383,246,206
5	03	01	1.09	02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	jumlah kendaraan dinas yang dilakukan pemeliharaan	Prov. Sulut	14 unit	287,258,188	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		14 unit	297,258,188
5	03	01	1.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	jumlah kegiatan pemeliharaan gedung kantor	Prov. Sulut	1 kegiatan	35,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kegiatan	36,200,000
5	03	01	1.09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	jumlah kegiatan pemeliharaan sarana/prasarana gedung kantor	Prov. Sulut	12 kegiatan	48,788,018	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		12 kegiatan	49,788,018
5	03	02			PRGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH								
5	03	02	1.01		Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	Prov. Sulut	100 %	3,243,985,648	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	100 %	3,327,985,648
5	03	02	1.01	01	Perumusan Bahan Kebijakan Pengadaan ASN	Jumlah naskah kajian/telaahan hukum yang dihasilkan	Prov. Sulut	1 kajian	306,930,168	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		1 kajian	326,930,168



5	03	02	1.01	02	Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN	Persentase Formasi Berdasarkan Kebutuhan PNS	Prov. Solut	80 %	136,585,202	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	80 %	146,585,202
5	03	02	1.01	03	Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK	Persentase Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK yang dilaksanakan	Prov. Solut	100 %	872,901,098	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	892,901,098
5	03	02	1.01	06	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian	Persentase Administrasi Pemberhentian ASN yang ditetapkan	Prov. Solut	100 %	136,752,795	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	139,752,795
5	03	02	1.01	08	Fasilitasi Lembaga Profesi ASN	Persentase Lembaga Profesi ASN lingkup Pemerintah Provinsi yang difasilitasi	Prov. Solut	100 %	582,821,804	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	592,821,804
5	03	02	1.01	10	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Integrasi Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Solut	100 %	544,200,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	554,200,000
5	03	02	1.01	11	Pengelolaan Data Kepegawaian	Persentase Pengelolaan Data Kepegawaian yang diperbaharui secara berkala	Prov. Solut	90 %	457,872,832	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	90 %	467,872,832
5	03	02	1.01	12	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase Evaluasi terhadap Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian	Prov. Solut	100 %	205,921,749	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	206,921,749
5	3	2	1		Mutasi dan Promosi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	Prov. Solut	100 %	656,688,085	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	686,688,085
5	03	02	1.02	01	Pengelolaan Mutasi ASN	Persentase Pengelolaan Mutasi ASN berdasarkan standart Computer Assesment Test	Prov. Solut	100 %	101,277,588	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	111,277,588
5	03	02	1.02	02	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Persentase Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN	Prov. Solut	100 %	185,359,351	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	195,359,351
5	03	02	1.02	03	Pengelolaan Promosi ASN	Jumlah jabatan administrasi pada instansi pemerintah; Jumlah jabatan pimpinan tinggi pada instansi pemerintah; Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah.	Prov. Solut	1082 jabatan 53 jabatan 6071 orang	370,051,146	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1082 jabatan 53 jabatan 6071 orang	380,051,146



5	3	2	1	Pengembangan Kompetensi ASN	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	Prov. Sulut	100 %	7,531,626,474	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	100 %	7,848,626,474
5	03	02	1.03	01 Peningkatan Kapasitas Kinerja ASN	Jumlah ASN yang mengikuti Peningkatan Kapasitas Kinerja	Prov. Sulut	15 orang	2,660,701,216	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		15 orang	2,940,701,216
5	03	02	1.03	02 Pengelolaan Assessment Center	Persentase PNS yang mengikuti Assessment	Prov. Sulut	100 %	108,100,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	118,100,000
5	03	02	1.03	04 Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN	Jumlah ASN yang mendapatkan Pendidikan Lanjutan	Prov. Sulut	27 orang	4,367,016,900	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		27 orang	4,377,016,900
5	03	02	1.03	05 Koordinasi dan Kerjasama Pelaksanaan Diklat	Jumlah PNS yang mengikuti Diklat	Prov. Sulut	20 orang	233,292,000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		20 orang	243,292,000
5	03	02	1.03	10 Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN	Persentase Fasilitasi Sertifikasi Fungsional ASN yang diusulkan	Prov. Sulut	100 %	34,526,099	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		100 %	39,526,099
5	03	02	1.03	14 Fasilitasi Pengembangan Karir dalam Jabatan Fungsional	Jumlah pemangku jabatan fungsional tertentu pada instansi pemerintah	Prov. Sulut	300 orang	127,990,259	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		300 orang	129,990,259
5	3	2	1	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian dan Peningkatan Kinerja, Kompetensi, dan Disiplin ASN	Prov. Sulut	100 %	731,937,094	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	-	100 %	758,937,094
5	03	02	1.04	01 Penyusunan Kebijakan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Jumlah Kebijakan yang dihasilkan	Prov. Sulut	2 kebijakan	15,453,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		2 kebijakan	17,453,250
5	03	02	1.04	02 Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rata-rata tingkat kehadiran PNS dalam 1 tahun	Prov. Sulut	90 %	15,453,250	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		90 %	19,453,250



5	03	02	1.04	04	Pengelolaan Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai	Persentase Pemberian Penghargaan Bagi Pegawai yang diusulkan	Prov. Sulut	100 %	324,388,254	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	334,388,254
5	03	02	1.04	07	Pembinaan Disiplin ASN	Persentase PNS yang terjaring SIDAK	Prov. Sulut	1 %	341,523,054	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	1 %	349,523,054
5	03	02	1.04	08	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Persentase Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN	Prov. Sulut	100 %	35,119,286	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100 %	38,119,286
TOTAL									24,731,962,180			25,484,162,180



BAB IV

RENCANA KERJA

DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, Pencapaian Renstra, dan visi dan misi Gubernur Sulawesi Utara yang tertuang dalam RPJMD.

Dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2022 terdapat 2 Program, 11 kegiatan, dan 43 Sub Kegiatan, yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi dan Program Kepegawaian Daerah. Kemudian dari 2 Program tersebut, di bagi dalam 11 kegiatan dan 43 sub kegiatan. Perumusan sub kegiatan pada setiap kegiatan dan program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran. Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan.

Perumusan kegiatan dan sub kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulawesi Utara.



BAB V PENUTUP

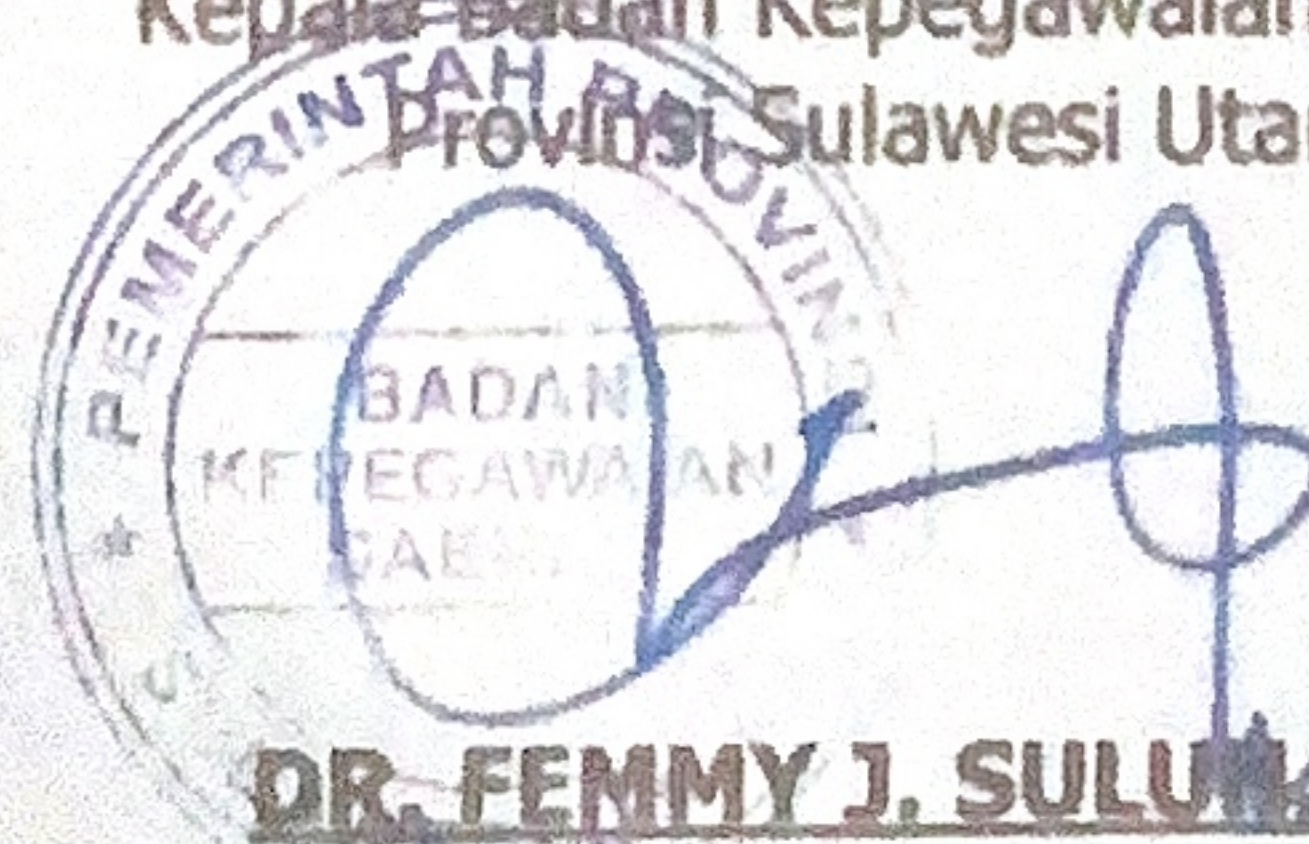
Rancangan Awal Rencana Kerja BKD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 sebagai rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan program strategis BKD Provinsi Sulawesi Utara tahun 2021-2026 seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis BKD Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu, untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan yang telah direncanakan, diperlukan adanya dukungan dari Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara dalam bentuk anggaran maupun sumber daya manusia yang berkompeten.

Disamping itu rencana kerja ini berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja BKD Provinsi Sulawesi Utara, patokan pelaksanaan kegiatan dan alat pengukur untuk melakukan evaluasi, baik secara tim, individu maupun keseluruhan instansi. Oleh sebab itu dalam pelaksanaannya, rencana kerja ini perlu didukung dengan dokumen-dokumen pendukung seperti Standar Operasional Prosedur (SOP).

Penyusunan Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Sulawesi Utara ini diharapkan dapat diimplementasikan melalui realisasi kegiatan, sehingga mampu meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi kinerja aparatur demi mewujudkan visi dan misi Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara.

Manado, Mei 2021

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi Sulawesi Utara,



DR. FEMMY J. SULUNG M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19700426 199010 2 001